

Peran Negara dalam Sekuritisasi Politik Identitas: Studi Komparatif Konflik Rohingya dan Palestina-Israel

Muhammad Zulfikar¹, Sophiana Widiastutie²

¹Mahasiswa Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta, Indonesia, 2110412039@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Dosen Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta, Indonesia, sophianawidiastutie@upnvj.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran negara dalam pembentukan politik identitas yang berujung pada kekerasan melalui studi kasus konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel. Dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi dan politik identitas, penelitian kualitatif komparatif ini menganalisis bagaimana pemerintah di kedua kasus mengonstruksi kelompok identitas tertentu sebagai ancaman keamanan. Temuan menunjukkan bahwa baik di Myanmar maupun dalam konflik Palestina-Israel, aktor negara secara aktif melakukan “sekuritisasi”, mencitrakan identitas etnis atau agama minoritas sebagai ancaman eksistensial, untuk membenarkan kebijakan represif dan kekerasan. Di Myanmar, rezim mengarusutamakan narasi ancaman terhadap identitas nasional Buddhis guna melegitimasi penindasan dan pembersihan etnis Rohingya. Sementara itu, dalam konflik Palestina-Israel, aktor negara Israel menekankan identitas Yahudi negara dan menyekuritisasi populasi Palestina sebagai ancaman, yang berujung pada okupasi militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa politik identitas yang disekuritisasi oleh negara dapat mendorong konflik kekerasan dan mengabaikan keamanan manusia kelompok tertindas. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman mengenai keterkaitan antara konstruksi identitas oleh negara, sekuritisasi, dan kekerasan terhadap minoritas dalam studi hubungan internasional.

Kata Kunci: Politik Identitas, Sekuritisasi, Kekerasan Negara, Rohingya, Israel-Palestina, Keamanan Manusia

Abstract

This article examines the role of the state in shaping identity politics that lead to violence, through comparative case studies of the Rohingya conflict in Myanmar and the Israel-Palestine conflict. Using the theoretical framework of securitization and identity politics, this qualitative comparative research analyzes how governments in both cases construct certain identity groups as security threats. The findings indicate that in both Myanmar and the Israel-Palestine conflict, state actors actively engaged in “securitization”, portraying ethnic or religious minority identities as existential threats, to justify repressive policies and violence. In Myanmar, the regime mainstreamed a narrative of threat to Buddhist national identity to legitimize the repression and ethnic cleansing of the Rohingya. Meanwhile, in the Israel-Palestine conflict, Israeli state actors emphasize the state’s Jewish identity and securitizes the Palestinian population as a threat, resulting in military occupation and human rights violations. The study concludes that identity politics securitized by the state can fuel violent conflict and neglect the human security of oppressed groups. These findings contribute to the understanding of identity conflicts, state violence, and human security in international relations by elucidating linkages between state-driven identity construction, securitization, and violence against minorities.

Keywords: Identity Politics, Securitization, State Violence, Rohingya, Israel-Palestine, Human Security

Pendahuluan

Isu politik identitas dan kekerasan etnis-religius tetap menjadi tantangan serius dalam hubungan internasional kontemporer. Konflik yang berakar pada perbedaan identitas etnis atau agama telah menjadi sumber kekerasan berkepanjangan di berbagai belahan dunia, sering kali sulit diselesaikan karena melibatkan dimensi historis, psikologis, dan simbolik yang dalam (Do Céu Pinto Arena, 2022). Negara, sebagai aktor sentral dalam sistem internasional, kerap berperan aktif dalam membentuk narasi identitas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kebijakan publik, struktur kelembagaan, dan pidato-pidato resmi para pemimpinnya. Narasi ini, bila diarahkan secara eksklusif atau manipulatif, dapat mengesahkan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap “lain” atau tidak sejalan dengan identitas nasional yang dominan. Dua contoh ekstrem dari fenomena ini adalah krisis Rohingya di Myanmar dan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Meskipun banyak konflik identitas terjadi di dunia, artikel ini secara purposif memilih dua contoh ekstrem dari fenomena ini: krisis Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel. Pemilihan ini didasarkan pada justifikasi metodologis. Kedua kasus, meskipun sangat kontras secara geografis, historis, dan dinamika konflik, justru menunjukkan sebuah pola fundamental yang serupa: peran sentral aktor negara dalam melakukan sekuritisasi terhadap kelompok minoritas. Dalam kedua konteks, negara secara aktif membingkai kelompok minoritas sebagai ancaman eksistensial untuk melegitimasi kebijakan represif yang sistematis. Dengan membandingkan dua kasus yang sangat berbeda namun menunjukkan mekanisme serupa, argumen mengenai peran negara dalam kekerasan identitas menjadi lebih kuat. Proses ini pada akhirnya tidak hanya menyebabkan penderitaan berkepanjangan dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga memperdalam jurang pemisah antara kelompok mayoritas dan minoritas yang terlibat.

Para ilmuwan telah lama mencermati dan mengkaji bagaimana politik identitas dapat menjadi pemicu kuat bagi kekerasan kolektif. Identitas kelompok yang dipolitisasi, misalnya yang berbasis pada suku, agama, atau etnis, sering kali dimanfaatkan oleh elite politik atau aktor kekuasaan untuk menggalang solidaritas internal yang eksklusif, yang dibingkai dalam oposisi biner “kita” versus “mereka” (Dhamoon, 2009). Dinamika ini dapat menciptakan ketegangan sosial yang akut, dan dalam kondisi tertentu, menimbulkan dehumanisasi terhadap kelompok lain yang diposisikan sebagai musuh atau ancaman. Dehumanisasi ini, pada gilirannya, dapat menjadi dasar moral atau psikologis untuk menjustifikasi kekerasan yang dilakukan terhadap mereka (Sen, 2007). Amartya Sen (2006) secara khusus mengingatkan bahwa penganut pandangan identitas tunggal yang sempit dan kaku sangat rentan terhadap hasutan untuk terlibat dalam konflik bernuansa kekerasan, karena kehilangan kapasitas untuk melihat kompleksitas kemanusiaan pihak lain. Dalam konteks negara-bangsa modern, identitas nasional mayoritas sering kali didefinisikan secara eksklusif dan homogen, sehingga keberadaan kelompok minoritas dianggap sebagai penyimpangan, bahkan sebagai ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa (Mann, 2004). Dorongan negara untuk mencapai homogenitas identitas nasional, menurut Michael Mann (2004), bukan hanya berimplikasi pada marginalisasi, tetapi juga dapat mendorong terjadinya praktik-praktik ekstrem seperti pembersihan etnis ketika kelompok tertentu dianggap menghalangi atau menggagalkan proyek nasional yang dianggap vital.

Dalam studi hubungan internasional, teori sekuritisasi menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana isu atau identitas tertentu dapat dikonstruksi sebagai ancaman keamanan melalui proses politis. Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998) memperkenalkan konsep sekuritisasi yang intinya menyatakan bahwa “keamanan” bukanlah kondisi objektif semata, melainkan hasil dari *speech act*, yaitu tindakan ujaran oleh aktor politik yang menyatakan sesuatu sebagai ancaman eksistensial (Buzan et al., 1998). Melalui langkah diskursif ini, sebuah isu dapat dipindahkan dari ranah

“politik biasa” menjadi “politik keamanan” yang mendesak, sehingga membenarkan penggunaan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) demi mengatasinya. Di sisi lain, teori politik identitas menunjukkan bahwa identitas kelompok bersifat cair dan dapat dipolitisasi oleh elit untuk meraih dukungan atau mengalihkan krisis. Identitas mayoritas sering dibentuk dalam oposisi dengan “minoritas berbahaya” demi menciptakan solidaritas internal (contohnya melalui *othering* atau penjelekan kelompok lain) (Pérez, 2015). Arjun Appadurai (2006) bahkan berpendapat bahwa dalam era globalisasi terjadi “ketakutan terhadap minoritas”, mayoritas nasional merasa proyek kebangsaannya tidak lengkap selama masih ada minoritas, sehingga timbul hasrat untuk menyingkirkan perbedaan kultural (Appadurai, 2006). Dalam kasus politik identitas, aktor negara dapat melakukan sekuritisasi dengan menggambarkan kelompok identitas tertentu (misalnya minoritas etnis atau agama) sebagai ancaman bagi kelangsungan bangsa atau negara. Ketika narasi ancaman ini diterima oleh audiens (masyarakat mayoritas), negara merasa legitimasi untuk menerapkan kebijakan keras yang mungkin melanggar norma demokrasi atau HAM, mulai dari diskriminasi hukum, penindasan, hingga kekerasan terbuka. Dinamika inilah yang dapat menyulut kekerasan kolektif: hubungan mayoritas-minoritas yang labil memicu keinginan “melenyapkan” kelompok minoritas demi homogenitas yang dianggap aman.

Myanmar dan Israel menawarkan studi kasus yang kontras secara geografis dan historis, namun menunjukkan pola serupa dalam bagaimana identitas digunakan dan dimanipulasi oleh negara dalam konteks konflik. Sejumlah penelitian terdahulu mengenai kasus yang relevan antara lain, Kyaw Zeyar Win (2018) dalam “*Securitization of the Rohingya in Myanmar*” yang mendokumentasikan bagaimana narasi negara, didukung oleh kelompok bisku nasionalis, secara sistematis membingkai Rohingya sebagai “teroris” dan “orang asing”, sehingga melegitimasi operasi militer dan diskriminasi struktural terhadap kelompok tersebut (Win et al., 2018). Di sisi lain, Uriel Abulof (2014) dalam “*Deep Securitization and Israel’s ‘Demographic Demon’*” menunjukkan bagaimana wacana keamanan di Israel mempersepsikan pertumbuhan penduduk Palestina sebagai ancaman eksistensial, dengan tujuan menjaga identitas mayoritas Yahudi melalui pembenaran kebijakan diskriminatif, pembatasan ruang, dan pembenaran kekerasan (Abulof, 2014). Sementara itu, studi dari Universitas Ottawa, ditulis oleh Michael Xiang Li (2018) dengan judul “*Defining the Other: Israeli Securitization of the Palestinian Population*”, menganalisis bagaimana wacana sekuritas digunakan untuk membenarkan kontrol militer dan pembatasan mobilitas warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dan mengidentifikasi kekurangan literatur komparatif yang membandingkan kasus Israel-Palestina secara langsung dengan teori sekuritisasi (Li, 2018). Namun, hingga kini masih minim penelitian yang mengkaji secara komparatif peran negara dalam membentuk politik identitas yang memicu kekerasan di Myanmar dan Israel-Palestina menggunakan perspektif teori sekuritisasi.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana negara, melalui aparat pemerintah dan elit politik dominan, membentuk narasi politik identitas yang berujung pada kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam dua kasus: Rohingya di Myanmar dan Palestina dalam hubungannya dengan Israel. Pertanyaan kunci yang dijawab adalah: **bagaimana proses sekuritisasi identitas dijalankan oleh aktor negara di masing-masing kasus, dan bagaimana hal itu berkontribusi pada terjadinya kekerasan?** Dengan kata lain, studi ini berargumen bahwa konstruksi “ancaman identitas” oleh negara merupakan faktor kunci yang mendorong terjadinya kebijakan dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Myanmar dan Palestina. Untuk membuktikan argumen tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Bagian selanjutnya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, diikuti dengan pemaparan hasil analisis masing-masing kasus serta pembahasan komparatif. Pada akhirnya, kesimpulan akan

disampaikan mengenai temuan utama dan implikasinya bagi studi konflik identitas, kekerasan negara, dan keamanan manusia.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-eksplanatif yang berakar pada paradigma konstruktivis, yang memandang keamanan bukan sebagai kondisi objektif, melainkan sebagai hasil dari proses konstruksi sosial dan politik. Desain penelitian ini adalah studi kasus komparatif, yang terinspirasi oleh logika metodologis Charles Ragin, khususnya menggunakan desain "sistem yang paling berbeda, hasil yang serupa" (*most different systems, similar outcome*) (Ragin, 2014). Pemilihan dua kasus yang secara fundamental berbeda (krisis Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel), secara sengaja dilakukan untuk memperkuat argumen utama. Apabila mekanisme kausal yang serupa, yaitu sekuritisasi identitas oleh negara, dapat diidentifikasi dalam konteks historis, geografis, dan politik yang sangat kontras, maka hal ini mengindikasikan kekuatan negara sebagai variabel penjelas yang signifikan, terlepas dari faktor kontekstual lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan membangun korpus data tekstual yang kaya untuk dianalisis. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan memadukan beragam jenis data kredibel yang mencakup: (1) literatur akademik berupa jurnal ilmiah dan buku terbitan pers/universitas ternama untuk membangun landasan teoretis yang kokoh; (2) dokumen resmi dari aktor negara, seperti pernyataan kebijakan, produk hukum (Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982), dan transkrip pidato pejabat tinggi (Kantor Perdana Menteri Israel, Kementerian Luar Negeri Myanmar), yang berfungsi sebagai data primer untuk menganalisis *speech act* sekuritisasi; dan (3) laporan investigatif dari organisasi internasional dan non-pemerintah yang memiliki reputasi tinggi, seperti Dewan HAM PBB, International Crisis Group, Human Rights Watch, dan Amnesty International, yang menyediakan data terverifikasi mengenai tindakan negara dan dampak kemanusiaannya.

Proses analisis data bersifat interpretif, menggabungkan analisis tematik dan analisis wacana kritis. Data yang telah terkumpul direduksi dan dikodifikasi untuk mengidentifikasi komponen-komponen kunci dari proses sekuritisasi sesuai kerangka *Copenhagen School*: aktor sekuritisasi, objek referen, *speech act*, audiens, dan tindakan-tindakan luar biasa yang diambil sebagai konsekuensinya (Buzan et al., 1998). Analisis wacana digunakan untuk membongkar bagaimana bahasa dimanfaatkan untuk melakukan dehumanisasi dan *othering*. Akhirnya, penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi statistik, melainkan generalisasi analitis, di mana temuan dari kedua kasus digunakan untuk memperdalam dan memperkaya pemahaman teoretis mengenai mekanisme yang menghubungkan konstruksi identitas oleh negara, proses sekuritisasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Hasil dan Pembahasan

a. Kerangka Konseptual: Sekuritisasi dan Politik Identitas

Securitization theory yang dipelopori oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) menekankan bahwa "keamanan" bukanlah kondisi obyektif semata, melainkan hasil proses sosial-politis di mana suatu isu diangkat sebagai ancaman eksistensial melalui bahasa atau *speech act* (Buzan et al., 1998). Ole Wæver, sebagai salah satu penggagas utamanya, menjelaskan bahwa proses ini dimulai ketika sebuah *securitizing actor* (pihak yang menyuarakan ancaman, seperti pemerintah atau pemimpin politik) melakukan *speech act*, dan berusaha untuk meyakinkan *audience* (pihak yang harus

diyakini) bahwa terdapat ancaman eksistensial terhadap kelangsungan sebuah *referent object* (sesuatu yang dianggap terancam, seperti identitas nasional atau kedaulatan negara). Apabila audiens menerima narasi ancaman tersebut, maka isu itu berhasil "diskuritisasi", yakni diangkat ke luar dari ranah politik biasa untuk membenarkan penggunaan langkah-langkah darurat. Sebagai contoh, pasca serangan 11 September 2001, wacana terorisme diskuritisasi sedemikian rupa sehingga hak-hak sipil ditangguhkan dan perang dilancarkan atas nama keamanan. Apabila sekuritisasi berhasil, isu tersebut bergeser menjadi permasalahan keamanan utama yang mengatasi hukum dan norma biasa. Implikasinya, negara merasa memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan apa pun " demi menyelamatkan bangsa". Dampak sekuritisasi politik identitas ini sering kali tragis bagi kelompok yang disasar: hak-hak sipil mereka dapat ditangguhkan, tindakan represif meningkat, dan kekerasan negara kian tereskalasi. Dari perspektif keamanan manusia, konsep yang menekankan perlindungan individu dari ancaman kekerasan dan ketakutan (United Nations Development Programme, 1994), sekuritisasi berbasis identitas oleh negara cenderung mengorbankan keamanan individu kelompok minoritas demi dalih keamanan nasional. Dengan kata lain, ketika identitas suatu kelompok telah dikonstruksi sebagai musuh internal, keselamatan dan kesejahteraan kelompok tersebut tidak lagi dipandang sebagai bagian dari "keamanan" oleh rezim yang berkuasa.

Di sisi lain, teori politik identitas merujuk pada upaya mengorganisir kepentingan atau solidaritas politik berdasarkan identitas kelompok tertentu, baik etnis, ras, agama, maupun kebangsaan. Identitas kelompok bukanlah sesuatu yang statis atau *given*; melainkan dikonstruksi melalui proses sejarah, wacana, dan institusi (Anderson, 2016). Negara modern berperan sentral dalam mendefinisikan batas-batas keanggotaan komunitas nasional, siapa yang dianggap "kita" dan siapa "mereka". Dalam banyak kasus, negara yang didominasi kelompok mayoritas akan menempatkan identitas mayoritas sebagai inti dari jati diri nasional, sementara kelompok lain dipinggirkan sebagai "*other*" yang dianggap kurang asli atau loyal. Penting untuk dicatat bahwa sekuritisasi sering kali berjalan seiring dengan praktik de-humanisasi atau *othering* dalam politik identitas, sehingga proses ini dapat melahirkan kebijakan eksklusif terhadap minoritas. Contohnya, konsep demokrasi etnis (*ethnic democracy*) menggambarkan sistem politik di mana sebuah kelompok etnis mayoritas memegang kekuasaan dan meminggirkan minoritas melalui struktur hukum dan politik, seperti yang dikaji oleh Smootha (2002) dalam konteks Israel (Smootha, 2002). Demikian pula di Myanmar, kaum Rohingya telah lama dicap sebagai *kaladan* (pendatang Benggala) yang dianggap memisahkan diri dan mengancam keutuhan Myanmar. Proses *othering* ini melanggengkan stereotip dan stigma, yang kerap kali dijadikan justifikasi eksklusif maupun kekerasan. Politik identitas yang eksklusif semacam ini menyediakan lahan subur bagi terbentuknya stereotip dan prasangka terhadap kelompok luar, yang dapat dimanfaatkan oleh elit politik untuk tujuan tertentu.

Secara teoretis, menggabungkan sekuritisasi dan politik identitas memberikan kerangka ampuh untuk memahami kekerasan terhadap kelompok minoritas. Sekuritisasi menjelaskan mekanisme mengangkat ancaman melalui diskursus keamanan; sedangkan politik identitas menjelaskan mengapa dan bagaimana identitas minoritas tertentu dijadikan sasaran. Wacana "ancaman identitas" biasanya muncul saat elit merasa kedudukannya terancam oleh perubahan politik. Barry Buzan dkk. menyebut hal ini sebagai sektor sekuritas masyarakat (*societal security*), yakni keamanan yang menyangkut *survival* identitas kolektif. *Societal insecurity* terjadi ketika sebuah komunitas merasa identitasnya terancam oleh kehadiran identitas lain. Kombinasi rasa takut dan sentimen primordial ini sering dimanfaatkan penguasa untuk meraih dukungan populis. Arjun Appadurai (2006) menggambarkan bahwa globalisasi memicu "*anxiety of incompleteness*", mayoritas bangsa merasa proyek nasional

mereka diganggu oleh eksistensi minoritas kecil, sehingga timbul rasa tidak aman yang irasional (Appadurai, 2006). Ironisnya, “ketakutan terhadap kelompok kecil” ini justru mendorong kekerasan besar-besaran terhadap minoritas di berbagai belahan dunia (genosida Rwanda, pembersihan etnis Balkan, dll.).

b. Konflik Myanmar: Sekuritisasi Rohingya sebagai Ancaman Nasional

Di Myanmar, politik identitas berperan nyata dalam marginalisasi etnis Rohingya, minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah Myanmar sejak lama menolak mengakui “Rohingya” sebagai salah satu etnis nasional; mereka secara resmi dicap sebagai imigran ilegal “*Bengali*” dari Bangladesh. Penolakan identitas ini dilembagakan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, yang secara efektif menolak status kewarganegaraan bagi sebagian besar Rohingya, menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) di tanah kelahirannya sendiri (Zarni & Cowley, 2014). Konstruksi Rohingya sebagai orang asing tak diinginkan ini merupakan tahap awal sekuritisasi oleh negara, menciptakan kesan bahwa keberadaan Rohingya adalah ancaman terhadap keutuhan bangsa dan identitas nasional Burma. Narasi rezim militer Orde Baru (1962-2011) menekankan persatuan nasional berbasis identitas etnis Bamar (Burma) dan agama Buddha, sehingga kaum Rohingya yang beretnis dan beragama berbeda ditempatkan sebagai “lain” yang diragukan loyalitasnya. Propaganda pemerintah pada era tersebut sering kali menggambarkan Rohingya sebagai penyusup yang mengancam demografi dan budaya lokal (Khatun, 2024).

Memasuki era transisi demokrasi setelah 2011, alih-alih meredakan ketegangan, politik identitas anti-Rohingya justru menguat seiring terbukanya ruang publik. Penelitian Erin Bijl dan Chris van der Borgh (2022) menunjukkan bahwa periode liberalisasi 2010-2015 di Myanmar disertai normalisasi ujaran kebencian anti-Muslim di ranah politik dan media. Proses sekuritisasi ini digerakkan secara sistematis oleh aliansi biksu ultranasionalis. Menurut Bijl & Van Der Borgh (2022), setelah kekerasan di Rakhine, muncul Gerakan 969 yang menyatakan bahwa “ras dan agama Buddha yang murni namun rentan” memerlukan perlindungan dari Islam. Melalui pamflet dan DVD, mereka menyebarkan *speech act* mengenai adanya “konspirasi Muslim global” untuk menaklukkan Myanmar (Bijl & Van Der Borgh, 2022). Meskipun Gerakan 969 kemudian dilarang, narasinya dilanjutkan dan diperkuat oleh organisasi yang lebih formal, MaBaTha, yang didirikan pada 2014. Dengan jangkauan media yang lebih luas hingga ke televisi nasional, MaBaTha secara eksplisit menggambarkan Islam sebagai “agama penjajah yang mengancam dan penuh kekerasan”. Untuk memperkuat citra ancaman, MaBaTha mengaitkan minoritas Muslim lokal dengan gerakan teroris global seperti *Islamic State* (IS). Taktik ini secara efektif membingkai mereka bukan sebagai minoritas yang tidak berbahaya, melainkan sebagai “*Trojan Horse*” dari “mayoritas yang menakutkan,” yaitu dunia Islam itu sendiri (Bijl & Van Der Borgh, 2022). Wacana “ancaman Muslim” ini menjadi alat politik yang ampuh: oposisi prodemokrasi seperti *National League for Democracy* (NLD) pun enggan mengkritik arus Islamofobia tersebut, khawatir kehilangan dukungan mayoritas. Akibatnya, sekuritisasi terhadap Rohingya makin mengakar. Puncaknya, terjadi kekerasan komunal yang melibatkan warga mayoritas Rakhine terhadap Rohingya pada tahun 2012-2013. Insiden kerusuhan dan pembantaian di Rakhine itu menewaskan hingga 1.000 orang dan memaksa pengungsian jangka panjang seluruh komunitas dari wilayahnya (Burke, 2016). Pemerintah Myanmar kala itu dituduh membiarkan, bahkan secara terselubung mendukung, kekerasan massa tersebut alih-alih melindungi minoritas.

Retorika negara kian mengeras setelah munculnya gerakan bersenjata Rohingya yang menamakan diri *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA). Pemerintah Myanmar segera melakukan sekuritisasi dengan melabeli kelompok ini sebagai “teroris ekstrimis Bengali”. Secara spesifik, pada

hari yang sama dengan serangan ARSA tanggal 25 Agustus 2017, pemerintah secara resmi mendeklarasikan ARSA sebagai organisasi teroris dan mengeluarkan arahan kepada media untuk secara wajib menggunakan label tersebut, bukan istilah lain seperti “pemberontak”. Narasi ancaman ini diperluas dengan tuduhan bahwa lembaga bantuan internasional berkolaborasi dengan ARSA, yang kemudian menjadi justifikasi untuk respons militer yang eskalatif dan tanpa kompromi. Dengan menyamakan seluruh populasi Rohingya dengan pemberontak bersenjata, militer (*Tatmadaw*) melancarkan operasi “pembersihan” besar-besaran di desa-desa Rohingya yang dibingkai sebagai operasi kontra-terorisme untuk menumpas ekstremis (International Crisis Group, 2017). Dalam beberapa minggu, ratusan desa Rohingya dibakar habis dan ribuan warga sipil dibunuh atau diperkosa. PBB melaporkan sedikitnya 725.000 Rohingya, lebih dari setengah populasi Rohingya di Myanmar, melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri (United Nations Human Right Council, 2018). Para penyelidik internasional menyimpulkan bahwa kekejaman yang dilakukan, termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan sistematis, menunjukkan adanya niat genosida. Pemerintah Myanmar di forum internasional berdalih bahwa operasi militernya sah sebagai “tindakan penanggulangan terorisme” terhadap militan Rohingya. Pernyataan Aung San Suu Kyi dan petinggi militer konsisten menolak tuduhan pelanggaran HAM, sembari tetap menyebut Rohingya sebagai “*Bengali*” ilegal, mengindikasikan bahwa konstruksi identitas Rohingya sebagai ancaman tetap dipertahankan. (United Nations Human Right Council, 2018).

Kasus Myanmar dengan jelas memperlihatkan mekanisme sekuritisasi politik identitas oleh negara dan konsekuensi kekerasannya. Dimulai dari penyangkalan identitas dan hak sipil (melalui kebijakan kewarganegaraan diskriminatif), pemerintah Myanmar kemudian menggalang dukungan mayoritas dengan narasi ancaman terhadap identitas nasional Buddhis. Dalam proses ini, peran aktor fungsional (*functional actors*) menjadi sangat krusial. Kelompok biksu ultranasionalis seperti Gerakan 969 dan MaBaTha berfungsi memperkuat dan menyebarkan wacana ancaman tersebut ke level akar rumput, sehingga melegitimasi narasi negara di mata publik mayoritas. Dukungan dari aktor-aktor fungsional inilah yang pada gilirannya memungkinkan militer untuk melakukan kekerasan terencana yang dibingkai sebagai upaya “penyelamatan bangsa”. Hasilnya adalah tragedi kemanusiaan: pembersihan etnis atau bahkan genosida *de facto* terhadap Rohingya (Zarni & Cowley, 2014). Sekuritisasi berhasil mengubah persepsi publik mayoritas, dari melihat Rohingya sebagai sesama warga menjadi musuh dalam selimut yang pantas ditumpas. Legitimasi sosial semacam ini memberi blanket approval bagi militer Myanmar untuk melakukan tindakan ekstrem tanpa menghadapi resistensi internal yang berarti. Dalam perspektif keamanan manusia, jelas bahwa negara gagal melindungi, bahkan justru mengancam, keamanan dasar kelompok Rohingya. Mereka kehilangan nyawa, rumah, dan hak-hak dasar atas nama dalih keamanan nasional yang semu.

c. **Konflik Palestina-Israel: Politik Identitas sebagai Isu Keamanan**

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan contoh klasik bagaimana identitas nasional yang bersaing disekuritisasi oleh aktor negara. Sejak pendirian Israel pada tahun 1948 sebagai “negara Yahudi”, isu demografi dan identitas telah menjadi pusat kekhawatiran keamanan bagi pemimpin Israel. Pembentukan Israel disertai pengusiran atau eksodus ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka, peristiwa yang dikenal sebagai “*Nakba*”, yang menciptakan krisis pengungsi besar-besaran (Khalidi, 2010). Israel menerapkan kebijakan yang mengutamakan migrasi Yahudi (contohnya *Law of Return* 1950 yang memberi hak otomatis bagi orang Yahudi dari mana pun untuk menjadi warga negara). Selain itu, selama dua dekade pertama, penduduk Arab-Palestina yang tetap tinggal di Israel

berada di bawah pemerintahan militer domestik, mencerminkan anggapan rezim bahwa populasi minoritas tersebut merupakan ancaman keamanan internal yang perlu diawasi. Sejak awal, identitas ke-Yahudi-an negara dipertahankan melalui dominasi politik kelompok mayoritas Yahudi dan marjinalisasi populasi Arab Palestina.

Pasca Perang 1967, Israel memperluas kendali atas wilayah yang mayoritas berpenduduk Palestina (Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza). Jutaan orang Palestina hidup di bawah pendudukan militer tanpa hak politik penuh. Di sini, sekritisasi identitas terjadi secara eksplisit: pemerintah Israel secara konsisten menggambarkan gerakan perlawanan Palestina, dari *Palestine Liberation Organization* (PLO) hingga kelompok seperti Hamas, semata-mata sebagai ancaman teroris terhadap eksistensi Israel. Sebagai contoh, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 29 September 2014, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan *speech act* dengan menyatakan bahwa "Hamas adalah ISIS dan ISIS adalah Hamas". Dengan menyamakan perlawanan Palestina dengan terorisme global, narasi ini bertujuan mendelegitimasi setiap aspirasi politik mereka dan membingkainya murni sebagai ancaman keamanan (The Prime Minister's Office of Israel, 2014). Diskursus resmi menekankan bahwa langkah-langkah keras diperlukan untuk menjamin "keamanan nasional" Israel menghadapi "musuh internal" ini (Olesker, 2014). Sebagai contoh, selama Intifada Kedua (2000-2005), aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan sebagian faksi Palestina dijawab Israel dengan pengerahan militer besar-besaran. Pemerintah Israel membingkai operasi militer di kota-kota Palestina, pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat, dan blokade terhadap Gaza sebagai langkah darurat untuk mencegah ancaman keamanan. Kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun berhasil menekan serangan terhadap warga Israel, menimbulkan penderitaan berat bagi penduduk sipil Palestina dan dikritik luas sebagai bentuk penghukuman kolektif (Human Rights Watch, 2021).

Politik identitas di Israel diinstitusikan dalam sistem hukum dan politik yang mempertahankan keunggulan kelompok mayoritas Yahudi. Oren Yiftachel (2006) menyebut Israel sebagai sebuah "etnokrasi", di mana identitas etnis mayoritas secara struktural mendominasi lembaga negara dan penguasaan lahan, sementara minoritas Palestina berada dalam subordinasi permanen (Yiftachel, 2006). Konsep serupa dikemukakan oleh Smootha (2002) yang menggolongkan Israel sebagai "demokrasi etnis", dimana negara menjalankan institusi demokratis namun secara implisit hanya benar-benar melayani etnis mayoritas (Smootha, 2002). Implikasi dari tata kelola semacam ini adalah terpinggirkannya kepentingan dan keamanan komunitas Palestina. Misalnya, undang-undang dan kebijakan pertanahan sangat menguntungkan warga Yahudi, sedangkan warga Arab menghadapi diskriminasi dalam akses lahan, perumahan, dan sumber daya (Yiftachel, 2006). Diskursus keamanan negara pun kerap menyebut pertumbuhan populasi Palestina sebagai "ancaman demografis" bagi masa depan Israel (Human Rights Watch, 2021). Seperti yang dicatat oleh Camilla Boisen (2024), wacana ini diekspresikan secara gamblang oleh pemimpin Israel, di mana Netanyahu pernah menggambarkan orang Palestina sebagai "binatang buas" (*wild beasts*), dan menegaskan posisi Israel sebagai "vila di tengah hutan" (Boisen, 2024). Persepsi bahwa identitas Yahudi negara harus dilindungi dari perubahan demografis maupun perlawanan politik membuat setiap tuntutan hak dari pihak Palestina mudah dicurigai sebagai ancaman eksistensial.

Konsekuensi dari sekritisasi menyeluruh ini adalah siklus kebijakan keras dan kekerasan negara yang terus berulang. Proses dehumanisasi ini menjadi pembenaran bagi kekerasan tersebut, di mana laporan dari *European Center for Constitutional and Human Rights* (ECCHR) mencatat penggunaan bahasa yang ekstrem oleh pejabat Israel. Contohnya, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyebut warga Palestina sebagai "binatang manusia" (*human animals*) (European Center for Constitutional

and Human Rights, 2014). Pasukan keamanan Israel secara rutin menerapkan penangkapan massal, penahanan tanpa pengadilan (*administrative detention*), dan tindakan represif lainnya terhadap warga Palestina dengan dalih mencegah terorisme. Berbagai operasi militer, dari invasi ke Lebanon, operasi di Tepi Barat, hingga serangan udara berulang di Gaza, dipresentasikan ke publik Israel sebagai “keharusan keamanan” untuk melindungi identitas dan keberlangsungan negara (Human Rights Watch, 2021). Narasi sekuritisasi yang kuat ini berhasil menghimpun dukungan mayoritas warga Israel bagi kebijakan garis keras, namun berujung pada penderitaan populasi Palestina. Human Rights Watch (2021) mendapati bahwa pemerintah Israel menjalankan kebijakan yang secara sistematis memprioritaskan kepentingan dan keamanan warga Yahudi di atas warga Palestina, baik di Israel maupun di wilayah pendudukan. Laporan tersebut bahkan menyimpulkan bahwa situasi ini memenuhi definisi *apartheid*, yakni sistem penindasan dan dominasi suatu kelompok ras/etnis terhadap kelompok lain, ditandai pembatasan gerak, perampasan tanah, dan pemisahan politik yang merugikan warga Palestina (Human Rights Watch, 2021). Dengan kata lain, sekuritisasi identitas oleh aktor negara Israel telah melampaui sekadar retorika; proses tersebut melembaga dalam struktur hukum, praktik pemerintahan, dan perilaku aparat keamanan sehari-hari. Bagi rakyat Palestina, kondisi ini berarti kehidupan di bawah bayang-bayang kontrol militer dan kekerasan, dengan keamanan manusia mereka terabaikan.

d. Analisis Komparatif

Analisis komparatif yang mendalam antara kasus Rohingya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel menyingkap adanya mekanisme fundamental yang serupa dalam penggunaan politik identitas oleh negara sebagai alat sekuritisasi, meskipun keduanya beroperasi dalam konteks, skala waktu, dan bentuk kekerasan yang berbeda. Di kedua kasus, negara secara sistematis mengonstruksi identitas kelompok minoritas sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas kolektif mayoritas, yang kemudian melegitimasi kebijakan represif dan kekerasan berskala besar. Namun, perbedaan dalam kapasitas negara, tujuan politik, dan konteks internasional menghasilkan dinamika dan hasil yang khas.

1). *Evolusi Wacana Sekuritisasi: Linimasa dan Intensitas 'Speech Act'*

Perbedaan paling signifikan antara kedua kasus terletak pada linimasa dan volume wacana sekuritisasi. Konflik Israel-Palestina ditandai oleh kampanye diskursif yang panjang, berlapis, dan adaptif selama lebih dari 75 tahun, sementara sekuritisasi Rohingya di Myanmar bersifat lebih linear, mengalami eskalasi yang cepat dan meledak dalam periode yang jauh lebih singkat.

Sekuritisasi terhadap warga Palestina bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses historis yang terus-menerus direproduksi dan disesuaikan dengan konteks politik yang berubah. Proses ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase diskursif yang saling tumpang tindih, menunjukkan volume *speech act* yang masif dan berkelanjutan. Fondasi sekuritisasi diletakkan sejak pendirian Israel. *Speech act* yang paling fundamental adalah legislasi, seperti *Law of Return* (1950) yang secara eksklusif memberikan hak imigrasi dan kewarganegaraan bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Sebaliknya, tidak ada legislasi serupa yang memberikan hak kembali bagi pengungsi Palestina, dan sistem hukum serta kebijakan yang ada secara efektif mencegah mereka untuk kembali (Lapidoth, 2001). Narasi dominan pada periode ini adalah “ancaman demografis” atau bom waktu demografis” (Human Rights Watch, 2021). Pertumbuhan populasi Palestina secara terbuka dibingkai sebagai ancaman eksistensial terhadap "karakter Yahudi" negara. Wacana ini, seperti yang dianalisis oleh Uriel Abulof, menjadi

justifikasi bagi kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni demografis Yahudi, termasuk melalui kontrol atas tanah dan sumber daya (Abulof, 2014). Sistem ini oleh akademisi seperti Oren Yiftachel digambarkan sebagai sebuah "etnokrasi", di mana satu kelompok etnis secara struktural mendominasi negara (Yiftachel, 2006).

Meletusnya Intifada Pertama (1987) dan Kedua (2000) menandai pergeseran fokus wacana sekuritisasi secara signifikan. Meskipun ancaman demografis tetap menjadi latar belakang, narasi utama bergeser ke arah "*international terrorism*" (Ben-Ami, 2006). Perlawanan Palestina, mulai dari pelemparan batu oleh anak-anak ("*Children of the Stones*") hingga serangan bunuh diri oleh kelompok militan, secara menyeluruh dibingkai sebagai tindakan teror yang mengancam keamanan warga sipil Israel (Papi, 2016). *Speech act* pada periode ini berpusat pada justifikasi tindakan-tindakan luar biasa sebagai respons keamanan. Pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat, sebagai contoh, secara resmi disebut sebagai "pagar keamanan" (*security fence*). Operasi militer berskala besar di kota-kota Palestina, seperti Operasi Perisai Pertahanan (*Operation Defensive Shield*), dibingkai sebagai keharusan untuk memberantas "infrastruktur teror" (Human Rights Watch, 2021). Volume retorika keamanan pada periode ini meningkat tajam, diproduksi secara konsisten oleh para pemimpin politik dan militer untuk melegitimasi kebijakan pendudukan yang semakin keras di mata audiens domestik dan internasional.

Dalam konteks "Perang Melawan Teror" global pasca-9/11 dan kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina 2006, wacana sekuritisasi Israel mengalami globalisasi dan intensifikasi dehumanisasi. *Speech act* kunci pada era ini adalah pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang secara eksplisit menyamakan Hamas dengan ISIS: "Hamas adalah ISIS dan ISIS adalah Hamas" (The Prime Minister's Office of Israel, 2014). Taktik diskursif ini sangat strategis, karena bertujuan untuk (1) mendelegitimasi aspirasi politik Palestina dengan mengasosiasikannya dengan terorisme transnasional yang paling ditakuti Barat, dan (2) meringkai konflik bukan lagi sebagai sengketa teritorial atau pendudukan, melainkan sebagai bagian dari benturan peradaban antara "dunia beradab" dan "Islam radikal" (Bader, 2023). Narasi ini turut diperkuat oleh pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut Operasi Banjir Al-Aqsa sebagai "*pure evil*" dan menyamakan kekejaman Hamas dengan "*ekses terburuk ISIS*" (Bader, 2023). Wacana ini diperkuat oleh bahasa dehumanisasi yang semakin ekstrem dari para pejabat. Pernyataan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menyebut warga Palestina sebagai "binatang manusia" (*human animals*) untuk menjustifikasi pengepungan total terhadap Gaza adalah contoh puncak dari proses ini (European Center for Constitutional and Human Rights, 2014). Volume *speech act* ini tidak hanya besar tetapi juga disebarluaskan secara luas melalui diplomasi publik (*hasbara*) untuk membentuk persepsi internasional (Iriqat & Owda, 2025).

Berbeda dengan siklus panjang di Israel-Palestina, sekuritisasi Rohingya di Myanmar mengikuti lintasan yang lebih linear, bergerak dari eksklusi legal menuju ledakan ujaran kebencian yang terkonsentrasi dan berujung pada kekerasan genosidal dalam waktu yang relatif singkat. Titik awal sekuritisasi di Myanmar adalah *speech act* legal yang bersifat fundamental: Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 (Burmese Rohingya Organisation UK, 2014). Undang-undang ini secara efektif mencabut status kewarganegaraan Rohingya, menolak eksistensi identitas mereka, dan secara resmi melabeli mereka sebagai "imigran ilegal Bengali". Selama beberapa dekade di bawah rezim militer, proses ini berjalan secara birokratis dan perlahan, menanamkan narasi "orang asing" ke dalam struktur negara dan kesadaran publik. Ini adalah

fase *othering* yang sistematis namun tidak disertai dengan volume wacana publik yang masif seperti pada fase berikutnya.

Paradoksnya, transisi menuju demokrasi membuka katup bagi ledakan wacana kebencian. Periode ini menyaksikan peningkatan volume dan intensitas *speech act* anti-Rohingya secara eksponensial. Aktor-aktor fungsional non-negara, terutama kelompok biksu ultranasionalis seperti Gerakan 969 dan MaBaTha yang dipimpin oleh Wirathu, menjadi mesin utama propaganda. Mereka menyebarkan narasi ancaman terhadap "ras dan agama Buddha" melalui pamflet, DVD, dan ceramah-ceramah yang penuh dengan dehumanisasi, menyebut Muslim sebagai "anjing gila" atau ancaman yang harus "dilenyapkan dari masyarakat manusia" (United States Holocaust Memorial Museum, n.d.). Momen krusial pada fase ini adalah penetrasi massal internet dan media sosial, khususnya Facebook. Platform ini menjadi "senjata" yang sangat efektif bagi militer dan kelompok nasionalis untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian secara viral, menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap Rohingya menjadi dapat diterima dan bahkan didukung oleh publik (Schissler, 2024). Laporan PBB secara eksplisit menyebut peran Facebook sebagai "instrumen yang berguna" dalam menyebarkan kebencian (United Nations Human Right Council, 2018).

Serangan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus 2017 menjadi pemicu (*trigger*) yang dimanfaatkan secara sempurna oleh negara. Pemerintah Myanmar dengan segera dan secara resmi mendeklarasikan ARSA sebagai "organisasi teroris" dan menginstruksikan media untuk menggunakan label tersebut. *Speech act* ini sangat terkonsentrasi dan instrumental. Dalam waktu singkat, seluruh populasi Rohingya disamakan dengan "teroris," dan operasi militer brutal yang menyusul dibingkai sebagai "operasi kontra-terorisme" yang sah. Narasi ini memberikan justifikasi final bagi "operasi pembersihan" (*clearance operations*) yang oleh PBB diidentifikasi memiliki "niat genosidal". (United Nations Human Right Council, 2018).

Secara komparatif, evolusi wacana ini menunjukkan bahwa strategi sekuritisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dan tujuan politiknya. Israel, sebagai negara dengan kapasitas kontrol yang tinggi dan tujuan manajemen konflik jangka panjang, mengembangkan wacana yang berlapis dan adaptif. Sebaliknya, Myanmar, sebagai negara yang lebih rapuh dengan tujuan eliminasi kelompok minoritas sebagai bagian dari proyek pembangunan bangsa yang homogen, menggunakan wacana yang lebih linear, langsung, dan meledak-ledak, yang dipercepat oleh teknologi media baru.

2). *Bentuk Kekerasan Negara: Kontrol Biopolitik vs. Kekerasan Eliminasionis*

Perbedaan dalam tujuan dan kapasitas negara juga tercermin dalam bentuk kekerasan dominan yang diterapkan. Di Israel-Palestina, kekerasan cenderung bersifat manajerial dan bertujuan untuk kontrol populasi jangka panjang. Di Myanmar, kekerasan terhadap Rohingya bersifat eliminasionis, bertujuan untuk pemusnahan dan pengusiran fisik.

Israel dapat dikonseptualisasikan sebagai "negara garnisun" (*garrison state*), sebuah istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog Baruch Kimmerling untuk menggambarkan masyarakat di mana militerisme dan pertimbangan keamanan menjadi prinsip pengorganisasian utama (Kimmerling, 2005). Dalam kerangka ini, kekerasan negara terhadap Palestina tidak selalu bertujuan untuk pemusnahan fisik secara langsung, melainkan untuk menegakkan sebuah sistem kontrol yang permanen dan komprehensif. Antropolog Jeff Halper menyebut sistem ini sebagai "Matriks Kontrol" (*Matrix of Control*), yaitu sebuah jaringan berlapis yang terdiri dari

mekanisme birokrasi (izin, registrasi), hukum (hukum militer), fisik (tembok pemisah, pos pemeriksaan, permukiman), dan teknologi (pengawasan digital, drone) yang dirancang untuk memecah belah, mengisolasi, dan mengendalikan setiap aspek kehidupan warga Palestina (Halper, 2000).

Sistem ini dapat dianalisis melalui dua kerangka teoretis yang saling melengkapi. Pertama, biopolitik Michel Foucault, yang merujuk pada kekuasaan negara untuk mengelola kehidupan populasi: mengatur siapa yang hidupnya dioptimalkan dan siapa yang dibiarkan rentan, demi kepentingan kelompok dominan (Means, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan Israel seperti kontrol atas sumber daya air (Amnesty International, 2017), pembatasan akses ke lahan pertanian (United Nations Conference on Trade and Development, 2022), dan blokade ekonomi di Gaza (United Nations Conference on Trade and Development, 2024), berfungsi sebagai alat biopolitik untuk melemahkan kapasitas hidup populasi Palestina. Kedua, nekropolitik Achille Mbembe, yang merupakan pengembangan dari biopolitik, merujuk pada kekuasaan negara untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati, seringkali melalui penciptaan "zona kematian" (*death-worlds*) di mana populasi sasaran hidup dalam kondisi antara hidup dan mati (Deprez, 2023). Pendudukan militer yang berkepanjangan, serangan militer periodik, dan kondisi di Gaza yang sering disebut sebagai "penjara terbuka" adalah manifestasi dari nekropolitik. Kekerasan di sini bersifat manajerial dan struktural, bertujuan untuk melumpuhkan kapasitas politik dan sosial Palestina, sebuah proses yang oleh Kimmerling disebut "politicide" (*politicide*), yaitu penghancuran eksistensi politik suatu bangsa (Yiftachel, 2009).

Sebaliknya, Myanmar merupakan contoh negara yang secara historis rapuh (*fragile state*), di mana proses pembentukan negara-bangsa (*state-building*) masih belum selesai dan penuh dengan kekerasan (United Nations Development Programme, 2019). Proyek negara ini didominasi oleh visi etno-nasionalis Bamar-Buddhis yang sempit, yang memandang keberagaman etnis sebagai ancaman bagi persatuan nasional (Leong, 2022). Dalam konteks negara yang lemah dengan kapasitas kontrol birokrasi yang terbatas, kekerasan fisik yang brutal dan langsung menjadi alat yang dianggap paling efisien untuk mencapai tujuan homogenisasi nasional.

Kekerasan yang diarahkan kepada Rohingya bersifat eliminasionis (Conversi, 2010). Tujuannya bukan untuk mengelola atau mengontrol populasi tersebut dalam jangka panjang, melainkan untuk menghilangkannya secara fisik dari wilayah negara. Proses ini sejalan dengan definisi akademis tentang pembersihan etnis dan genosida, yang melibatkan tindakan-tindakan seperti pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan penghancuran desa-desa untuk membuat suatu wilayah tidak dapat dihuni oleh kelompok sasaran. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 menjadi landasan hukum untuk proses eliminasi ini, yang kemudian dieksekusi melalui kekerasan fisik pada tahun 2012, 2016, dan puncaknya pada 2017 (Burmese Rohingya Organisation UK, 2014). Kekerasan di sini bukanlah alat manajemen, melainkan alat pemusnahan sebagai bagian dari proyek pembangunan negara yang eksklusif dan kejam. Ini menunjukkan bagaimana negara yang lemah dapat menggunakan kekerasan genosidal sebagai strategi brutal untuk menyelesaikan "masalah" minoritas dan memaksakan visi identitas nasionalnya (Silkoseit & Skarpeteig, 2022).

3). *Peran Aktor Eksternal dan Masyarakat Sipil: Pemberdayaan vs. Penderitaan*

Dinamika sekuritisasi dan kekerasan di kedua kasus tidak dapat dipisahkan dari peran aktor eksternal dan ruang bagi masyarakat sipil domestik. Konteks internasional dan domestik

menciptakan lingkungan yang sangat berbeda: Israel secara aktif diberdayakan oleh negara adidaya dalam ruang diskursif yang diperebutkan, sementara Myanmar diizinkan bertindak dengan impunitas oleh pelindung kekuatan besar dalam ruang diskursif domestik yang hegemonik.

Peran aktor eksternal, khususnya di Dewan Keamanan PBB, menunjukkan perbedaan yang tajam. Untuk Israel, Amerika Serikat secara konsisten bertindak sebagai pemberdaya (*enabler*). Hal ini terwujud dalam dua bentuk utama. Pertama, melalui bantuan militer masif yang mencapai miliaran dolar setiap tahun, yang secara efektif menyubsidi pendudukan dan industri pertahanan Israel (Bhungalia et al., 2019). Bantuan ini memastikan superioritas militer Israel dan mengurangi biaya ekonomi dari pendudukan. Kedua, melalui perlindungan diplomatik di panggung internasional. Sejak tahun 1972, AS telah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB puluhan kali untuk memblokir resolusi yang mengkritik kebijakan Israel, sehingga mencegah tindakan internasional yang mengikat secara hukum (O'Dell, 2023). Peran AS ini bukan sekadar pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang memungkinkan Israel untuk mempertahankan "Matriks Kontrol"-nya tanpa menghadapi konsekuensi internasional yang berat.

Untuk Myanmar, konstelasi internasionalnya berbeda. Rezim militer dilindungi oleh aliansi kekuatan besar dan kelumpuhan regional. Di Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia secara konsisten menggunakan (atau mengancam akan menggunakan) hak veto mereka untuk melindungi rezim Myanmar dari sanksi yang mengikat, embargo senjata, atau rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) (United Nations, 2007). Posisi ini didorong oleh kepentingan strategis dan ekonomi mereka sendiri, termasuk penjualan senjata dan investasi infrastruktur (Indo-Pacific Defense Forum, 2021). Di tingkat regional, prinsip "non-intervensi" ASEAN secara efektif melumpuhkan setiap upaya respons kolektif yang berarti, memberikan perlindungan diplomatik lebih lanjut bagi Myanmar (Gultom, 2025). Lingkungan ini menciptakan ruang hampa akuntabilitas yang memungkinkan rezim Myanmar melakukan kekerasan ekstrem dengan impunitas.

4). *Kontra-Narasi Masyarakat Sipil: Termarginalisasi vs. Diberangus*

Perbedaan mencolok lainnya terletak pada ruang bagi masyarakat sipil untuk menantang narasi keamanan negara. Di Israel, meskipun sangat termarginalisasi secara politik, terdapat masyarakat sipil yang aktif dan vokal yang secara konsisten memproduksi kontra-narasi. Organisasi seperti B'Tselem (Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan) dan *Breaking the Silence* (organisasi veteran tentara Israel) secara teliti mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan dan secara terbuka menantang wacana keamanan resmi pemerintah (Human Rights Watch, 2017). Mereka menyediakan data dan perspektif alternatif yang digunakan oleh media internasional, akademisi, dan bahkan beberapa pemerintah asing. Namun, keberadaan mereka memicu reaksi keras dari negara dan kelompok-kelompok pro-pemerintah, yang melancarkan kampanye delegitimasi untuk mencap mereka sebagai pengkhianat atau agen asing yang didanai secara tidak sah, dengan tujuan untuk membungkam kritik dan menghancurkan sumber daya finansial mereka (Murciano & Stiftung Wissenschaft Und Politik, 2020).

Di Myanmar, ruang untuk perbedaan pendapat mengenai isu Rohingya hampir tidak ada. Suara-suara kritis di dalam negeri diberangus secara brutal melalui penangkapan, intimidasi, dan kekerasan (Human Rights Watch, 2017). Bahkan gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh

Aung San Suu Kyi secara historis memilih untuk diam mengenai penderitaan Rohingya, kemungkinan besar karena takut kehilangan dukungan dari mayoritas Bamar yang telah terpapar narasi nasionalis. Akibatnya, kontra-narasi terhadap sekuritisasi Rohingya hampir seluruhnya berasal dari aktor eksternal: organisasi diaspora Rohingya, LSM hak asasi manusia internasional, dan badan-badan PBB seperti UNHRC (Minority Rights Group, 2012). Ketiadaan tantangan internal yang signifikan membuat narasi keamanan negara menjadi hampir hegemonik di dalam Myanmar, memfasilitasi mobilisasi dukungan publik untuk tindakan kekerasan terhadap Rohingya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah langkah sekuritisasi tidak hanya bergantung pada kekuatan *speech act* itu sendiri, tetapi juga pada struktur geopolitik dan lanskap politik domestik yang dapat memperkuat, menantang, atau mengabaikannya.

Kesimpulan

Penelitian komparatif ini menegaskan bahwa politik identitas yang disekuritisasi oleh negara dapat menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan kolektif terhadap kelompok minoritas. Melalui studi kasus Myanmar dan Palestina-Israel, terlihat pola serupa di mana rezim mayoritas membangun narasi ancaman eksistensial yang dilekatkan pada identitas komunitas minoritas (Rohingya di Myanmar, dan Palestina dalam konteks Israel). Narasi ancaman ini kemudian digunakan untuk membenarkan berbagai tindakan represif, mulai dari pengingkaran hak sipil, diskriminasi terstruktur, hingga kekerasan massal yang berujung pada pembersihan etnis. Di Myanmar, sekuritisasi identitas menghasilkan tragedi kemanusiaan berupa pengusiran dan pemusnahan besar-besaran etnis Rohingya. Sementara di Israel-Palestina, sekuritisasi yang berkelanjutan mewujud dalam sistem dominasi dan penindasan jangka panjang terhadap rakyat Palestina, yang oleh sejumlah pengamat disebut sejenis "*apartheid modern*".

Tujuan penelitian ini untuk memahami proses tersebut telah tercapai dengan mengungkap elemen-elemen kunci sekuritisasi. Pertama, terbukti bahwa identitas mayoritas (Myanmar: Bamar-Buddhis; Israel: Yahudi) dijadikan *referent object* yang diklaim terancam, dan minoritas distereotipkan secara monolitik sebagai sumber ancaman. Kedua, upaya sekuritisasi berhasil ketika didukung audiens mayoritas, ini terjadi di Myanmar dan Israel, di mana sebagian besar populasi mendukung atau apatis terhadap penderitaan Rohingya/Palestina karena sudah terpengaruh narasi resmi. Ketiga, konsekuensi berhasilnya sekuritisasi identitas adalah meluasnya kekerasan struktural (hukum dan kebijakan diskriminatif, pemiskinan dan peminggiran kelompok target) yang kemudian memfasilitasi kekerasan langsung (pengusiran massal, pembunuhan, perang).

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur hubungan internasional dan kajian global mengenai konflik identitas dan keamanan. Pertama, studi ini memperlihatkan betapa kuatnya dampak konstruksi identitas oleh negara: ketika definisi "kita" dan "mereka" diperalat dalam bingkai keamanan, konsekuensinya adalah tergerusnya norma-norma perlindungan sipil dan eskalasi kekerasan yang sulit dibendung. Kedua, hasil analisis menekankan perlunya mengintegrasikan perspektif keamanan manusia dalam menangani konflik berbasis identitas. Keamanan nasional yang sempit, yang hanya mengutamakan keberlangsungan rezim atau dominasi mayoritas, terbukti tidak sejalan dengan keamanan individu-individu dari semua golongan. Upaya perdamaian dan pencegahan kekerasan di kasus seperti Myanmar dan Palestina menuntut dekonstruksi politik ketakutan yang dibangun atas nama identitas. Negara dan komunitas internasional perlu mendorong narasi inklusif yang mengakui keberagaman identitas dalam suatu bangsa, sekaligus menegakkan prinsip hak asasi manusia universal. Hanya dengan demikian, ancaman semu yang diciptakan oleh politik identitas eksklusif dapat diredam, dan tragedi kemanusiaan serupa di masa depan dapat dicegah.

Sebagai arah pengembangan lebih lanjut, pendekatan serupa dapat diterapkan pada konteks lain untuk menguji apakah pola sekuritisasi identitas yang ditemukan dalam studi ini juga muncul di tempat berbeda, misalnya peran pemerintah India dalam sekuritisasi identitas Muslim (kasus Kashmir atau kerusuhan komunal), atau pemerintah Tiongkok dengan Uyghur. Selain itu, diperlukan telaah mengenai strategi *desecuritization*, yakni bagaimana memutar balik proses sekuritisasi demi resolusi konflik. Apakah perubahan rezim atau tekanan internasional dapat mengubah narasi dominan? Pengamatan awal menunjukkan hal itu sulit tanpa transformasi mendasar dalam identitas nasional inklusif. Dalam kasus Rohingya dan Palestina, langkah menuju rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan kemanusiaan dan keanggotaan penuh mereka dalam komunitas politik. Selama konstruksi identitas berbasis oposisi dan ketakutan masih dijadikan fondasi kebijakan negara, prospek penyelesaian konflik yang inklusif dan berakar pada keadilan sosial akan tetap terhalang.

Daftar Pustaka

- Abulof, U. (2014). Deep Securitization and Israel's "Demographic Demon." *International Political Sociology*, 8(4), 396–415. <https://doi.org/10.1111/ips.12070>
- Amnesty International. (2017, November 29). The Occupation of Water. *The Occupation of Water*. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/>
- Anderson, B. R. O. (2016). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised edition). Verso.
- Appadurai, A. (2006). *Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822387541>
- Bader, A. (2023, October 12). The Israeli Discourse On Al-Aqsa Flood Operation [News & Analysis]. *The Israeli Discourse On Al-Aqsa Flood Operation*. <https://www.palestine-studies.org/en/node/1654381>
- Ben-Ami, S. (2006). *Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy*. Oxford University Press.
- Bhungalia, L., Greven, J., & Mustafa, T. (2019). The Shifting Contours of US Power and Intervention in Palestine. *Middle East Report 290 (Spring 2019): The New Landscape of Intervention*. <https://merip.org/2019/07/the-shifting-contours-of-us-power-and-intervention-in-palestine/>
- Bijl, E., & Van Der Borgh, C. (2022). Securitization of Muslims in Myanmar's Early Transition (2010–15). *Nationalism and Ethnic Politics*, 28(2), 105–124. <https://doi.org/10.1080/13537113.2021.2003624>
- Boisen, C. (2024). Israel's Punitive War on Palestinians in Gaza. *Journal of Genocide Research*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2406098>
- Burke, A. (2016). New Political Space, Old Tensions: History, Identity and Violence in Rakhine State, Myanmar. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 258–283. JSTOR.
- Burmese Rohingya Organisation UK. (2014, December). *Myanmar's 1982 Citizenship Law and Rohingya*. Burmese Rohingya Organisation UK. <https://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf>
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis* (Nachdr.). Rienner.

- Conversi, D. (2010). *Cultural Homogenization, Ethnic Cleansing, and Genocide*. Unpublished. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2623.5603>
- Deprez, M. (2023). Visual Necropolitics and Visual Violence: Theorizing Death, Sight, and Sovereign Control of Palestine. *International Political Sociology*, 17(3), olad016. <https://doi.org/10.1093/ips/olad016>
- Dhamoon, R. (2009). *Identity/Difference Politics: How Difference is Produced, and Why It Matters*. UBC Press.
- Do Céu Pinto Arena, M. (2022). The Impact of Ethnic Groups on International Relations. In M. Charountaki & D. Irrera (Eds.), *Mapping Non-State Actors in International Relations* (pp. 73–94). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91463-9_5
- European Center for Constitutional and Human Rights. (2014). *Gaza and the Matter of Genocide: Q&A on the Law and Recent Developments*. European Center for Constitutional and Human Rights. https://www.ecchr.eu/fileadmin/Q_As/ECCHR_Q_A__Gaza_and_Genocide_20241210.pdf
- Gultom, C. A. (2025, February 13). Navigating Sovereignty, Security and Humanity: The ASEAN Way and the Rohingya Crisis. *Navigating Sovereignty, Security and Humanity: The ASEAN Way and the Rohingya Crisis*. <https://modern diplomacy.eu/2025/02/13/navigating-sovereignty-security-and-humanity-the-asean-way-and-the-rohingya-crisis/>
- Halper, J. (2000). A Matrix of Control: “The 94 Percent Solution.” *Middle East Report 216 (Fall 2000)*, 216 (Fall 2000). <https://merip.org/2000/09/the-94-percent-solution/>
- Human Rights Watch. (2017). *World Report 2017: Burma, Events of 2016*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/burma>
- Human Rights Watch. (2021). *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>
- Indo-Pacific Defense Forum. (2021, October 7). *Myanmar nears brink as self-interests of China, Russia stymy global efforts* [Online post]. Indo-Pacific Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/2021/10/myanmar-nears-brink-as-self-interests-of-china-russia-stymy-global-efforts/>
- International Crisis Group. (2017). *Myanmar’s Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase* (No. 292). International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/292-myanmars-rohingya-crisis-enters-dangerous-new-phase>
- Iriqat, D., & Owda, M. (2025). Israel’s Public Diplomacy Strategies “Hasbara” Case Study: Pinkwashing in Israeli Politics. *Journal of Ecohumanism*, 4(3), 363–369. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i3.6698>
- Khalidi, R. (2010). *Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness*. Columbia University Press.
- Khatun, A. (2024). Media, Propaganda, and the Othering Process of the Rohingyas. In K. Ahmed & Md. R. Islam (Eds.), *Understanding the Rohingya Displacement* (pp. 169–199). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1424-7_11
- Kimmerling, B. (2005). *The Invention and Decline of Israeliness: State, Society, and the Military* (First paperback printing). University of California Press.
- Lapidoth, R. (2001, January 15). Do Palestinian Refugees Have a Right to Return to Israel? [Government Website]. *Do Palestinian Refugees Have a Right to Return to Israel?* <https://www.gov.il/en/pages/do-palestinian-refugees-have-a-right-to-return-to-israel>

- Leong, J. (2022). *Whose Nation is This? Conceptualizing Burmese National Identity Through Case Studies of Inter-Ethnic Conflict—Digital Commons @ Colby*. Digital Commons @ Colby. <https://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/1345/>
- Li, M. X. (2018). *Defining the Other Israeli Securitization of the Palestinian population in the West Bank and Gaza since 2009*. My University. <https://doi.org/10.20381/RUOR-22388>
- Mann, M. (2004). *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817274>
- Means, A. J. (2022). Foucault, Biopolitics, and the Critique of State Reason. *Educational Philosophy and Theory*, 54(12), 1968–1969. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1871895>
- Minority Rights Group. (2012, July 16). *Civil Society Organisations Deeply Concerned by Ongoing Violence against Stateless Rohingya in Myanmar (Burma) and Their Refoulement from Bangladesh* [Online post]. Minority Rights Group. <https://minorityrights.org/civil-society-organisations-deeply-concerned-by-ongoing-violence-against-stateless-rohingya-in-myanmar-burma-and-their-refoulement-from-bangladesh/>
- Murciano, G. & Stiftung Wissenschaft Und Politik. (2020). Unpacking the Global Campaign to Delegitimize Israel: Drawing the Line between Criticism of Israel and Denying Its Legitimacy. *SWP Research Paper*, 7/2020. <https://doi.org/10.18449/2020RP07>
- O'Dell, H. (2023, December 18). How the US has used its power in the UN to support Israel for decades—Chicago Council on Global Affairs. *How the US Has Used Its Power in the UN to Support Israel for Decades*. <https://globalaffairs.org/commentary-and-analysis/blogs/how-us-has-used-its-power-un-support-israel-decades>
- Olesker, R. (2014). National Identity and Securitization in Israel. *Ethnicities*, 14(3), 371–391. <https://doi.org/10.1177/1468796813504093>
- Papi, K. E. (2016, February 19). ‘Children of the Stones’: The Securitization of Palestinian Children by Israel. *‘Children of the Stones’: The Securitization of Palestinian Children by Israel*. <https://www.e-ir.info/2016/02/19/children-of-the-stones-the-securitization-of-palestinian-children-by-israel/>
- Pérez, E. O. (2015). Ricochet: How Elite Discourse Politicizes Racial and Ethnic Identities. *Political Behavior*, 37(1), 155–180. <https://doi.org/10.1007/s11109-013-9262-0>
- Ragin, C. C. (2014). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies* (Online-ausg). University of California Press.
- Schissler, M. (2024). Beyond Hate Speech and Misinformation: Facebook and the Rohingya Genocide in Myanmar. *Journal of Genocide Research*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/14623528.2024.2375122>
- Sen, A. (2007). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny (Issues of Our Time)* (1st ed.). W. W. Norton & Company, Incorporated.
- Silkoset, A., & Skarpeteig, M. I. (2022). Why do the Levels of Sexual Violence Vary Across Genocides? A Comparison of the Bengali and Kurdish Genocides. *Nordic Journal of Human Rights*, 40(2), 365–388. <https://doi.org/10.1080/18918131.2021.1964788>
- Smootha, S. (2002). The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and Democratic State. *Nations and Nationalism*, 8(4), 475–503. <https://doi.org/10.1111/1469-8219.00062>
- The Prime Minister’s Office of Israel. (2014). *Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Speech at the United Nations General Assembly* (p. 10). United Nations. https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/69/il_en_25.pdf

- United Nations. (2007, January 12). *Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Myanmar, Owing to Negative Votes by China, Russian Federation*. United Nations. <https://press.un.org/en/2007/sc8939.doc.htm>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022, December 13). *The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Cost of Restrictions in Area C Viewed from Above*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/publication/economic-costs-israeli-occupation-palestinian-people-cost-restrictions-area-c-viewed>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Preliminary Assessment of the Economic Impact of the Destruction in Gaza and Prospects for Economic Recovery* (No. UNCTAD/OSG/INF/2024/1; p. 19). United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/publication/preliminary-assessment-economic-impact-destruction-gaza-and-prospects-economic-recovery>
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994. *UNDP (United Nations Development Programme)*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- United Nations Development Programme. (2019, June). *Do fragile and conflict-affected countries prioritise core government functions?* United Nations Development Programme. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/CGFs%20in%20FCAS%20Combined%20Report_v1.1-web.pdf
- United Nations Human Right Council. (2018). *Report of Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (27 August 2018)* (No. A/HRC/39/64). United Nations Human Right Council. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/reportofthe-myanmar-ffm>
- United States Holocaust Memorial Museum. (n.d.). Chapter III: Weakened—Burma’s Path to Genocide. *Chapter III: Weakened - Burma’s Path to Genocide*. <https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide/chapter-3/>
- Win, C., Chambers, J., McCarthy, G., & Farrelly, N. (Eds.). (2018). 11. Securitization of the Rohingya in Myanmar. In *Myanmar Transformed?* (pp. 251–276). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814818551-015>
- Yiftachel, O. (2006). *Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine*. University of Pennsylvania press.
- Yiftachel, O. (2009). “Creeping Apartheid” in Israel-Palestine. *Middle East Report 253 (Winter 2009)*, 253. <https://merip.org/2009/12/creeping-apartheid-in-israel-palestine/>
- Zarni, M., & Cowley, A. (2014). The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 23(3), 683.